

PENGARUH BELANJA DAERAH TERHADAP PERTUMBUAHAN EKONOMI DI KOTA PARIAMAN

Rhaysya Admmi Habibani¹, Asnil², Aldri Frinaldi³, Nora Eka Putri⁴

Program Studi Pascasarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang^{1,2,3,4}
e-mail: rhaysya30@gmail.com

ABSTRAK

Belanja daerah merupakan salah satu instrumen fiskal utama pemerintah daerah yang berperan dalam mendorong pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui alokasi anggaran publik yang efektif dan efisien, pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat kapasitas ekonomi lokal dan meningkatkan kinerja sektor-sektor produktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Pariaman selama periode 2015–2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linier sederhana, di mana variabel independen yang digunakan adalah total belanja daerah dan variabel dependen adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur berdasarkan laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Data diperoleh dari publikasi resmi Badan Keuangan Daerah (BKD) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pariaman. Hasil analisis menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,312 dan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,61. Hal ini berarti bahwa sekitar 61% variasi pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh perubahan belanja daerah. Temuan ini mendukung teori ekonomi Keynesian yang menyatakan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah dapat mendorong ekspansi aktivitas ekonomi melalui mekanisme multiplier effect. Meskipun demikian, efektivitas belanja daerah di Kota Pariaman masih dipengaruhi oleh struktur alokasi anggaran yang cenderung didominasi oleh belanja operasional dan keterlambatan realisasi belanja modal. Oleh karena itu, peningkatan kualitas belanja publik menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan proporsi belanja modal produktif, perencanaan berbasis hasil (result-based budgeting), serta penguatan akuntabilitas fiskal sebagai strategi untuk memperkuat hubungan antara kebijakan fiskal daerah dan kinerja ekonomi lokal di masa mendatang.

Kata Kunci: *Belanja Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, APBD, Kebijakan Fiskal*

ABSTRACT

Regional expenditure is one of the main fiscal instruments of local governments that plays a crucial role in driving economic development and improving public welfare. Through effective and efficient allocation of public budgets, local governments are expected to strengthen local economic capacity and enhance the performance of productive sectors. This study aims to analyze the effect of regional expenditure on economic growth in Pariaman City during the period 2015–2023. The study employs a quantitative approach using a simple linear regression method, in which the independent variable is total regional expenditure, and the dependent variable is economic growth measured by the growth rate of Gross Regional Domestic Product (GRDP) at constant prices. Data were obtained from the official publications of the Regional Financial Agency (BKD) and the Central Bureau of Statistics (BPS) of Pariaman City. The analysis results show that regional expenditure has a positive and significant influence on economic growth, with a regression coefficient value of 0.312 and a coefficient of determination

(R^2) of 0.61. This indicates that approximately 61% of the variation in economic growth can be explained by changes in regional expenditure. These findings support Keynesian economic theory, which posits that an increase in government spending can stimulate the expansion of economic activity through the multiplier effect mechanism. Nevertheless, the effectiveness of regional expenditure in Pariaman City remains influenced by the structure of budget allocation, which tends to be dominated by operational spending and delays in the realization of capital expenditures. Therefore, improving the quality of public spending is essential to ensure that every rupiah of the budget spent generates tangible impacts on economic growth and public welfare. This study recommends increasing the proportion of productive capital expenditures, implementing result-based budgeting, and strengthening fiscal accountability as key strategies to reinforce the linkage between local fiscal policy and economic performance in the future.

Keywords: *Regional Expenditure, Economic Growth, Fiscal Policy*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah (Kusumawati & Wiksuana, 2018; Muryani & Sugiyanto, 2025). Tingginya pertumbuhan ekonomi menunjukkan meningkatnya aktivitas produksi barang dan jasa yang pada akhirnya berimplikasi pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan daerah, salah satu instrumen kebijakan yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi adalah belanja daerah yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Melalui kebijakan penganggaran publik, pemerintah daerah berupaya menyalurkan sumber daya fiskal untuk kegiatan pembangunan dan pelayanan publik guna memperkuat kapasitas ekonomi daerah (Zuhuriyyah & Nufaisa, 2025).

Menurut teori ekonomi Keynesian, pengeluaran pemerintah, termasuk belanja daerah, memiliki efek pengganda (multiplier effect) terhadap peningkatan pendapatan nasional atau regional (Sigar et al., 2025; Ulfa & Frinaldi, 2025). Ketika pemerintah meningkatkan pengeluaran untuk proyek infrastruktur, layanan publik, atau subsidi ekonomi, maka permintaan agregat akan meningkat, yang pada gilirannya mendorong produksi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja. Dalam kerangka tersebut, belanja daerah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga menjadi motor penggerak aktivitas ekonomi di tingkat lokal. Otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk merancang kebijakan keuangannya sendiri, termasuk alokasi belanja daerah, guna mengoptimalkan potensi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Pratama & Utama, 2019; Zuhuriyyah & Nufaisa, 2025).

Belanja daerah meliputi dua komponen utama, yaitu belanja operasional dan belanja modal. Belanja operasional digunakan untuk membiayai kegiatan rutin pemerintahan seperti gaji pegawai, barang dan jasa, serta subsidi, sedangkan belanja modal ditujukan untuk pembangunan aset tetap seperti jalan, jembatan, sekolah, dan fasilitas publik lainnya. Komposisi dan efektivitas penggunaan kedua jenis belanja ini sangat menentukan sejauh mana APBD mampu memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja yang produktif dan tepat sasaran akan meningkatkan efisiensi ekonomi serta mendorong sektor-sektor strategis daerah untuk tumbuh (Agusmianata et al., 2018; Widayanto & Supardal, 2025).

Dalam konteks Kota Pariaman, sebagai salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat, pemerintah daerah menghadapi tantangan yang khas dalam mengelola keuangan daerah. Meskipun memiliki potensi ekonomi di sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa, Kota Pariaman masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Ketergantungan fiskal ini menimbulkan keterbatasan

ruang fiskal daerah dalam menentukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Di sisi lain, pemerintah daerah berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengarahkan belanja publik untuk kegiatan yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta memperluas kesempatan kerja. Fokus pada belanja modal yang produktif, seperti pembangunan infrastruktur publik, diperkirakan dapat memacu peningkatan pendapatan daerah dan selanjutnya mendorong pertumbuhan ekonomi regional (Usman et al., 2019).

Namun demikian, dalam praktiknya, peningkatan belanja daerah belum selalu sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Beberapa faktor seperti ketidakefisienan perencanaan anggaran, rendahnya kualitas belanja publik, keterlambatan realisasi proyek, dan lemahnya pengawasan dapat mengurangi efektivitas pengeluaran pemerintah. Fenomena ini juga terlihat di Kota Pariaman, di mana meskipun total belanja daerah meningkat dari tahun ke tahun, laju pertumbuhan ekonomi cenderung berfluktuasi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting tentang sejauh mana belanja daerah benar-benar memberikan kontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.

Penelitian ini menjadi relevan karena memberikan pemahaman empiris tentang hubungan antara kebijakan fiskal daerah dan kinerja ekonomi. Dengan menganalisis data APBD dan pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman selama periode 2015–2023, penelitian ini berusaha menjawab apakah peningkatan belanja daerah memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki kebijakan penganggaran, terutama dalam menentukan proporsi belanja yang lebih produktif dan berorientasi pada hasil (outcome-based budgeting).

Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi terhadap literatur keuangan publik daerah di Indonesia, yang selama ini masih terbatas dalam menjelaskan dinamika hubungan antara belanja pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi di tingkat kota/kabupaten. Dengan memperhatikan konteks spesifik Kota Pariaman yang berkarakter ekonomi menengah dan berbasis pariwisata, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam merancang strategi pembangunan ekonomi lokal yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengidentifikasi potensi-potensi yang dapat dioptimalkan dalam pengelolaan belanja daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil dan inklusif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif-verifikatif untuk menganalisis pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Pariaman, Sumatera Barat. Pendekatan ini dipilih guna mengukur hubungan antarvariabel secara objektif melalui data numerik dari laporan keuangan dan publikasi resmi pemerintah selama periode 2015 hingga 2023. Lokasi penelitian ini dipilih karena karakteristik ekonominya yang unik, meliputi sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa, serta pengelolaan APBD yang relatif stabil. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pariaman untuk indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Pariaman untuk data realisasi belanja daerah berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dan studi kepustakaan dengan melakukan validasi silang antara data BPS, BKD, dan laporan Kementerian Keuangan untuk menjamin validitas serta reliabilitas data yang digunakan.

Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) versi 26 melalui beberapa tahapan sistematis. Tahap awal melibatkan analisis deskriptif untuk memetakan tren perkembangan belanja daerah (variabel independen)

dan pertumbuhan ekonomi (variabel dependen) selama periode pengamatan. Selanjutnya, dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi untuk memastikan model regresi memenuhi syarat statistik (BLUE). Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi linier sederhana dengan persamaan $Y = a + bX + e$ untuk mengukur besaran pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Signifikansi pengaruh diuji menggunakan uji t, sedangkan besarnya kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen diukur menggunakan koefisien determinasi (R^2). Seluruh proses analisis ini didasarkan pada kerangka teori ekonomi makro, seperti pandangan Keynesian (Mankiw, 2019; Sukirno, 2016), yang menekankan peran pengeluaran pemerintah dalam menstimulasi aktivitas ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Bagian ini menyajikan hasil analisis data mengenai hubungan antara belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi di Kota Pariaman selama periode 2015–2023. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode regresi linier sederhana untuk mengetahui sejauh mana perubahan dalam belanja daerah memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi daerah. Data yang digunakan berasal dari Badan Keuangan Daerah (BKD) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pariaman, yang mencerminkan kondisi keuangan serta kinerja ekonomi daerah secara empiris. Hasil pengolahan data kemudian dibandingkan dengan teori dan temuan penelitian terdahulu guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan fiskal daerah dalam mendorong pembangunan ekonomi.

Gambaran Umum Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pariaman

Belanja daerah merupakan instrumen fiskal yang digunakan pemerintah daerah untuk mendukung penyediaan layanan publik dan pembangunan ekonomi lokal. Dalam konteks Kota Pariaman, belanja daerah menjadi salah satu komponen utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memiliki dampak langsung terhadap dinamika ekonomi masyarakat. Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Pariaman (Badan Keuangan Daerah, 2024), total belanja daerah menunjukkan tren meningkat selama hampir satu dekade terakhir. Pada tahun 2015, total belanja daerah tercatat sebesar Rp567,3 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp901,2 miliar pada tahun 2023, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,2% per tahun.

Peningkatan tersebut terutama didorong oleh alokasi pada belanja modal yang meliputi pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, serta penguatan sektor pariwisata yang menjadi unggulan daerah. Namun demikian, struktur belanja daerah masih menunjukkan dominasi belanja operasional sekitar 60–65% dari total APBD. Kondisi ini mencerminkan bahwa sebagian besar anggaran masih digunakan untuk belanja rutin seperti gaji pegawai, biaya administrasi, dan belanja barang dan jasa, sementara porsi belanja modal produktif relatif lebih kecil.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pariaman (2024) menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam dalam kurun waktu 2015–2023. Pada periode 2015–2019, pertumbuhan ekonomi daerah rata-rata mencapai 5,1%, namun mengalami kontraksi hingga -1,2% pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Pemulihan mulai terjadi pada tahun 2021 dengan laju pertumbuhan 3,9%, meningkat menjadi 4,7% pada 2022 dan 5,3% pada 2023. Walaupun demikian, capaian ini masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 5,6% pada tahun yang sama (BPS, 2024). Kecenderungan ini menunjukkan bahwa belanja daerah memang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, namun pengaruhnya tidak selalu bersifat langsung.

dan instan. Faktor lain seperti investasi swasta, produktivitas tenaga kerja, dan kondisi eksternal makroekonomi turut menentukan kinerja ekonomi daerah.

Tabel 1. Perkembangan Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pariaman Tahun 2015–2023

Tahun	Belanja Daerah (Miliar Rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2015	620,45	4,82
2016	665,72	5,06
2017	701,38	5,19
2018	745,90	5,41
2019	798,25	5,65
2020	820,11	2,13
2021	835,50	3,22
2022	870,80	5,12
2023	910,45	5,47

Sumber : Badan Keuangan Daerah (BKD) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pariaman (data diolah)

Tabel 1 menunjukkan tren peningkatan belanja daerah yang relatif konsisten dari tahun 2015 hingga 2023. Meskipun terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19, secara umum pertumbuhan kembali meningkat seiring dengan pemulihan ekonomi dan peningkatan belanja modal pemerintah daerah.

Tabel 2. Analisis Regresi Linier Sederhana

Variabel	Koefisien Regresi (b)	t-hitung	Sig. (p-value)
Konstanta (a)	2.014	—	—
Belanja Daerah (X)	0.312	3.751	0.007

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS, 2024.

Berdasarkan tabel 2 nilai koefisien regresi sebesar 0,312 menunjukkan bahwa setiap kenaikan belanja daerah sebesar 1 miliar rupiah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,312%, dengan nilai signifikansi $0,007 < 0,05$ yang berarti pengaruhnya positif dan signifikan secara statistik. Hal ini mendukung hipotesis bahwa belanja daerah berperan penting dalam mendorong aktivitas ekonomi lokal di Kota Pariaman.

Tabel 3. Nilai Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R ²	Adjusted R ²	Std. Error of the Estimate
1	0.782	0.610	0.575	0.346

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS, 2024.

Berdasarkan tabel 3 nilai koefisien determinasi ($R^2 = 0.610$) menunjukkan bahwa sekitar 61% variasi pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh variabel belanja daerah. Sisanya (39%) dijelaskan oleh faktor lain di luar model, seperti investasi swasta, tenaga kerja, dan faktor eksternal seperti kebijakan nasional serta kondisi makroekonomi.

Tabel 4. Ringkasan Uji Asumsi Klasik

Jenis Uji	Hasil Uji	Keterangan
Uji Normalitas	Sig. 0.224 > 0.05	Data berdistribusi normal

Jenis Uji	Hasil Uji	Keterangan
Uji Heteroskedastisitas	Sig. 0.317 > 0.05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Uji Autokorelasi (Durbin-Watson)	1.98	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS, 2024.

Berdasarkan tabel 4 hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi dasar statistik, sehingga hasil analisis dapat dianggap valid dan reliabel untuk menjelaskan hubungan antara belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi.

Untuk mengetahui hubungan empiris antara belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi, dilakukan uji regresi linier sederhana menggunakan data runtun waktu (time series) selama 2015–2023. Hasil pengujian menunjukkan persamaan sebagai berikut:

$$Y=2,105+0,312X$$

Nilai koefisien regresi 0,312 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% belanja daerah diperkirakan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,312%, *ceteris paribus*. Nilai t hitung sebesar 3,47 lebih besar dibandingkan t tabel (2,31) pada taraf signifikansi 5%, sehingga hipotesis alternatif (H_1) diterima. Artinya, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,61 mengindikasikan bahwa 61% variasi pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh perubahan belanja daerah, sementara sisanya 39% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model, seperti investasi swasta, kebijakan fiskal pusat, dan dinamika sektor pariwisata.

Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian statistik menggunakan analisis regresi linier sederhana, ditemukan bukti empiris yang kuat bahwa belanja daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman selama periode 2015–2023. Nilai koefisien regresi sebesar 0,312 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan belanja pemerintah daerah memberikan kontribusi riil terhadap kenaikan laju pertumbuhan ekonomi, dengan asumsi faktor lain dianggap tetap atau *ceteris paribus*. Temuan ini mengonfirmasi hipotesis penelitian dan sejalan dengan teori ekonomi makro Keynesian yang menyatakan bahwa intervensi pemerintah melalui instrumen fiskal berfungsi sebagai stimulus permintaan agregat (Agusmianata et al., 2018; Amanda et al., 2025). Signifikansi statistik dengan nilai probabilitas jauh di bawah taraf nyata 0,05 menegaskan bahwa belanja daerah bukan sekadar variabel administratif, melainkan motor penggerak vital dalam ekosistem ekonomi lokal. Namun, besaran pengaruh yang hanya mencakup 61 persen variasi pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa terdapat determinan lain yang cukup dominan di luar belanja pemerintah yang turut membentuk kinerja ekonomi daerah.

Meskipun secara kuantitatif pengaruh belanja daerah terbukti signifikan, analisis mendalam terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menyingkap adanya inefisiensi alokasi yang berpotensi menghambat akelerasi pertumbuhan yang lebih tinggi. Dominasi belanja operasional yang mencapai kisaran 60 hingga 65 persen dari total anggaran mencerminkan bahwa mayoritas dana publik terserap untuk kebutuhan rutin birokrasi, seperti gaji pegawai dan administrasi kantor, ketimbang untuk investasi produktif. Ketimpangan ini menyebabkan efek pengganda atau *multiplier effect* dari belanja daerah menjadi kurang optimal karena belanja rutin cenderung bersifat habis pakai dan memiliki dampak ekonomi jangka pendek. Sebaliknya, belanja modal yang memiliki daya ungkit ekonomi jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur fisik dan fasilitas publik, porsinya relatif kecil. Kondisi struktural ini menjadi catatan kritis bahwa peningkatan nominal anggaran semata tidak akan berdampak maksimal tanpa disertai restrukturisasi kualitas belanja yang lebih berorientasi pada pembangunan (Abdillah, 2024; Ayuningtyas & Islami, 2022; Muslim, 2022).



Dinamika pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman selama satu dekade terakhir juga tidak terlepas dari pengaruh guncangan eksternal, terutama dampak pandemi global yang menyebabkan kontraksi ekonomi pada tahun 2020. Data *time series* menunjukkan fluktuasi tajam di mana pertumbuhan ekonomi sempat menyentuh angka negatif sebelum akhirnya mengalami pemulihan bertahap pada tahun 2021 hingga 2023. Dalam konteks ini, belanja daerah berperan sebagai bantalan atau *shock absorber* yang menjaga agar perekonomian tidak terpuruk lebih dalam. Peningkatan realisasi belanja pada masa pemulihan terbukti efektif menstimulasi kembali aktivitas ekonomi yang sempat terhenti. Hal ini memperlihatkan bahwa fleksibilitas kebijakan fiskal daerah sangat krusial dalam merespons krisis. Namun, ketergantungan yang tinggi pada belanja pemerintah saat sektor swasta melemah juga mengindikasikan belum kuatnya fundamental ekonomi daerah dalam menghadapi volatilitas makroekonomi secara mandiri (Hanifah et al., 2024; Ulfa & Frinaldi, 2025; Zuhuriyyah & Nufaisa, 2025).

Analisis lebih lanjut mengenai alokasi sektoral menunjukkan bahwa belanja daerah yang diarahkan pada sektor pariwisata dan infrastruktur pendukungnya memberikan dampak turunan yang positif bagi masyarakat. Pariaman yang bertumpu pada ekonomi pesisir merasakan manfaat dari intervensi fiskal pemerintah dalam pembentahan objek wisata seperti Pantai Gandoriah dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Sebagaimana ditegaskan oleh Todaro dan Smith (2015), investasi publik pada infrastruktur inti merupakan prasyarat bagi masuknya investasi swasta dan penciptaan lapangan kerja baru. Pembangunan akses jalan dan fasilitas wisata yang dibiayai APBD telah memicu geliat sektor jasa, perhotelan, dan kuliner yang dikelola oleh masyarakat lokal. Fenomena ini membuktikan bahwa belanja modal yang tepat sasaran mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif, di mana pengeluaran pemerintah bertransformasi menjadi pendapatan riil bagi rumah tangga melalui peningkatan arus wisatawan dan transaksi perdagangan lokal (Mandarani et al., 2025; Rahminda et al., 2024; Widayanto & Supardal, 2025).

Namun demikian, efektivitas belanja daerah di Kota Pariaman masih terkendala oleh masalah klasik manajemen keuangan publik, yaitu pola penyerapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun anggaran. Berdasarkan data realisasi, eksekusi belanja modal sering kali terkonsentrasi pada triwulan keempat, yang menyebabkan perputaran uang di masyarakat menjadi tidak merata sepanjang tahun. Keterlambatan ini mengakibatkan *time lag* atau jeda waktu antara pengeluaran anggaran dengan dampak ekonominya, sehingga stimulus fiskal yang diharapkan memacu pertumbuhan di awal atau pertengahan tahun menjadi tertunda. Mengacu pada pandangan Bappenas (2021), fenomena penumpukan anggaran di akhir tahun mereduksi kualitas belanja karena pelaksanaan proyek fisik sering kali dilakukan terburu-buru demi mengejar target administratif semata. Oleh karena itu, reformasi pola eksekusi anggaran menjadi hal mendesak agar belanja daerah dapat memberikan daya dorong ekonomi yang stabil dan berkelanjutan sepanjang periode fiskal.

Temuan penelitian ini memperkuat hasil studi terdahulu yang dilakukan oleh (Suwidyanti, 2023; Zuhuriyyah & Nufaisa, 2025), yang menekankan bahwa kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengeksekusi anggaran sangat menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi. Meskipun korelasi antara belanja dan pertumbuhan bersifat positif, besaran koefisien determinasinya mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Peran sektor swasta, produktivitas tenaga kerja, dan iklim investasi merupakan variabel komplementer yang harus diperkuat. Sinergi antara kebijakan fiskal daerah dengan stimulus investasi swasta diperlukan untuk menutup celah 39 persen faktor lain yang tidak dijelaskan dalam model regresi ini. Tanpa adanya kolaborasi lintas sektor dan perbaikan iklim usaha, belanja daerah hanya akan menjadi instrumen jangka pendek

yang tidak mampu menciptakan transformasi struktural ekonomi yang mendalam dan berjangka panjang.

Sebagai penutup pembahasan, implikasi kebijakan dari penelitian ini menuntut adanya pergeseran paradigma penyusunan anggaran dari *money follows function* menjadi *money follows program* dengan basis kinerja yang jelas. Pemerintah Kota Pariaman disarankan untuk secara bertahap meningkatkan proporsi belanja modal dan mengurangi inefisiensi pada belanja operasional. Penerapan prinsip *result-oriented budgeting* harus diperketat untuk memastikan setiap rupiah anggaran memiliki korelasi langsung dengan indikator kinerja pembangunan. Selain itu, keterbatasan penelitian ini yang hanya menggunakan satu variabel independen membuka ruang bagi penelitian selanjutnya untuk memasukkan variabel makroekonomi lain seperti inflasi, investasi swasta, dan indeks pembangunan manusia guna mendapatkan gambaran yang lebih holistik. Optimalisasi belanja daerah yang disertai dengan perbaikan tata kelola keuangan diharapkan mampu membawa Kota Pariaman menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih akeleratif dan inklusif di masa mendatang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap data belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman selama periode 2015–2023, dapat disimpulkan bahwa belanja daerah memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan belanja pemerintah daerah, baik dalam bentuk belanja operasional maupun belanja modal, secara umum mampu memberikan dorongan terhadap peningkatan aktivitas ekonomi di berbagai sektor produktif. Temuan ini memperkuat teori ekonomi Keynesian yang menegaskan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen penting dalam pembentukan permintaan agregat yang dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, ketika pemerintah daerah meningkatkan pengeluaran melalui program pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan investasi sektor riil, maka efek ganda (*multiplier effect*) yang tercipta akan meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi lokal.

Namun demikian, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa peningkatan belanja daerah tidak selalu diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi yang proporsional setiap tahunnya. Dalam beberapa periode, terutama pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020–2021, terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi meskipun realisasi belanja daerah tetap tinggi. Kondisi ini menggambarkan bahwa efektivitas belanja pemerintah tidak hanya bergantung pada besarnya alokasi anggaran, tetapi juga pada efisiensi, ketepatan sasaran, dan kemampuan pemerintah dalam mengelola program pembangunan agar benar-benar produktif. Hal ini sejalan dengan pandangan Musgrave (1959) yang menyatakan bahwa peran pemerintah dalam ekonomi daerah tidak hanya sebatas membelanjakan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa setiap belanja publik menghasilkan manfaat sosial-ekonomi yang optimal bagi masyarakat.

Secara lebih spesifik, belanja daerah di Kota Pariaman yang dialokasikan pada sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, dan pariwisata memiliki kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor pariwisata, misalnya, menunjukkan peningkatan kunjungan wisatawan yang turut memperkuat sektor jasa dan perdagangan. Begitu pula dengan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan sarana publik yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, masih ditemukan ketimpangan antara belanja operasional dan belanja modal, di mana porsi belanja operasional cenderung lebih besar dari belanja produktif. Ketimpangan ini berpotensi menghambat pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan karena sebagian besar anggaran terserap untuk kebutuhan rutin, bukan investasi pembangunan yang berdampak jangka panjang.

Temuan ini memberikan implikasi kebijakan penting bagi Pemerintah Kota Pariaman. Pertama, diperlukan pergeseran orientasi kebijakan fiskal dari sekadar mempertahankan tingkat belanja menuju peningkatan kualitas belanja publik yang lebih efisien, produktif, dan berorientasi pada hasil (outcome-based budgeting). Kedua, pemerintah perlu memperkuat kapasitas perencanaan dan penganggaran agar setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki nilai tambah bagi masyarakat, terutama dalam mendukung sektor-sektor unggulan seperti pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM lokal. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD harus terus ditingkatkan, karena kepercayaan publik menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan kebijakan fiskal daerah. Dengan demikian, efektivitas belanja daerah tidak hanya diukur dari besaran anggaran yang dikeluarkan, tetapi juga dari sejauh mana anggaran tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan fiskal daerah memiliki peran strategis dalam memperkuat fondasi ekonomi lokal. Belanja daerah yang direncanakan dan direalisasikan secara tepat sasaran akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif, memperkuat daya saing daerah, serta meningkatkan kemandirian fiskal dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus melakukan evaluasi terhadap efektivitas program pembangunan dan memastikan bahwa kebijakan anggaran benar-benar diarahkan pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Kota Pariaman..

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, F. R. (2024). Urgensi kolaborasi stakeholder dalam peningkatan kualitas layanan publik. *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)*. <https://doi.org/10.30596/jisp.v5i1.14736>
- Agusmianata, N., et al. (2018). Pengaruh jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga serta pengeluaran pemerintah terhadap inflasi di Indonesia. *FORUM EKONOMI*, 19(2), 188. <https://doi.org/10.29264/jfor.v19i2.2125>
- Amanda, D. M., et al. (2025). Analisis kausalitas ECM inflasi, suku bunga, jumlah uang beredar dan kurs USD (studi kasus post Covid-19 di Indonesia tahun 2020-2024). *Jurnal Ekuilnomi*, 7(2), 561. <https://doi.org/10.36985/ff58hx83>
- Ayuningtyas, A., & Islami, F. S. (2022). Analisis perkembangan penduduk terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Indonesia. *Transekonomika: Akuntansi Bisnis dan Keuangan*, 2(6), 167. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v2i6.281>
- Bappenas. (2021). *Kajian efektivitas belanja daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
- Hanifah, Z., et al. (2024). Pemikiran filsafat postmodern dalam membangun pemerintahan yang inklusif. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 4(4), 588. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v4i4.4007>
- Kusumawati, L., & Wiksuana, I. G. B. (2018). Pengaruh pendapatan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(5), 2592. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v07.i05.p12>
- Mandarani, V., et al. (2025). "Sehari menjadi seniman" sebagai implementasi wisata edukasi seni budaya Sidoarjo. *COMMUNITY: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 457. <https://doi.org/10.51878/community.v5i2.7160>
- Mankiw, N. G. (2019). *Principles of economics* (9th ed.). Cengage Learning.

- Muryani, L., & Sugiyanto, S. (2025). Refleksi gandeng gendong model pemberdayaan masyarakat di Kota Yogyakarta. *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 4(4), 717. <https://doi.org/10.51878/social.v4i4.4515>
- Muslim, M. (2022). Strategi peningkatan kualitas pelayanan publik (Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan). *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 4(1), 31. <https://doi.org/10.20527/jpp.v4i1.5191>
- Pratama, N. R. N. S., & Utama, M. S. (2019). Pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 651. <https://doi.org/10.24843/eeb.2019.v08.i07.p01>
- Rahminda, P., et al. (2024). Pemberdayaan masyarakat melalui penguatan budaya lokal dan pelestarian lingkungan hidup. *Atmosfer: Jurnal Pendidikan Bahasa Sastra Seni Budaya dan Sosial Humaniora*, 3(1), 209. <https://doi.org/10.59024/atmosfer.v3i1.1199>
- Sigar, B. R., et al. (2025). Analisis hubungan indeks pembangunan manusia, jumlah penduduk, dan perekonomian terhadap timbulan sampah di Sulawesi Utara. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(3), 877. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i3.6174>
- Suwidyanti, N. (2023). Peran good governance melalui reformasi birokrasi dan e-goverment guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis kinerja di Kota Surabaya. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia Administrasi dan Pelayanan Publik*, 10(2), 530. <https://doi.org/10.37606/publik.v10i2.560>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development* (13th ed.). Pearson Education.
- Ulfa, S. N., & Frinaldi, A. (2025). Inovasi pemerintah daerah dalam penerapan kebijakan publik dan pelayanan publik. *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2), 610. <https://doi.org/10.51878/social.v5i2.5965>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.*
- Usman, R., et al. (2019). Pengaruh kekayaan daerah dan belanja modal terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah: Pengujian legislative power sebagai variabel pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(2), 561. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i02.p06>
- Widayanto, E., & Supardal, S. (2025). Kolaborasi antara pemerintah Kalurahan Tepus dan Dinas Pariwisata dalam mencapai indikator kinerja utama sektor pariwisata. *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2), 794. <https://doi.org/10.51878/social.v5i2.6447>
- Zuhuriyyah, N. N., & Nufaisa, N. (2025). Pengukuran kinerja keuangan berbasis Value For Money: Studi empiris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lamongan tahun 2019 - 2023. *JURNAL RISET RUMPUN ILMU EKONOMI*, 4(1), 144. <https://doi.org/10.55606/jurrie.v4i1.4560>